

Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia

Reza Wardhana Syam¹, Haslina², Khusnul Khatimah³, Nanda Siti Nabila Syarif⁴, Nurul Fatiha⁵, Andi Santri Syamsuri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Korespondensi: rezawardhanasyam531@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Desember 29th, 2025

Direvisi Januari 24th, 2026

Diterima February 02th, 2026

Kata kunci:

Media Sosial, DPR RI,
Kepercayaan Publik, Komunikasi
Politik, Transparansi..

ABSTRAK

Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memegang peranan strategis dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai representasi rakyat, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan publik. Keberadaan DPR RI tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusionalnya, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Miriam Budiardjo, 2018).

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Indonesia masih tergolong fluktuatif. Berbagai survei menunjukkan bahwa DPR RI kerap menempati posisi rendah dalam indeks kepercayaan publik dibandingkan lembaga negara lainnya. Rendahnya kepercayaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota dewan, kurangnya transparansi dalam proses legislasi, serta maraknya pemberitaan negatif terkait konflik kepentingan, korupsi, dan elitisme politik (Dwiyanto, 2017). Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan pola komunikasi politik. Era digital mendorong pergeseran dari komunikasi politik konvensional yang bersifat satu arah menuju komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif. Media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara aktor politik dan masyarakat (Castells, 2013).

Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi sekadar menjadi alat penyebaran informasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembentukan opini publik, citra politik, serta legitimasi kekuasaan. Bagi anggota DPR RI, media sosial membuka peluang besar untuk menyampaikan kinerja secara terbuka, menjelaskan kebijakan publik, menampung aspirasi masyarakat, serta membangun kedekatan emosional dengan konstituen. Pemanfaatan media sosial secara optimal berpotensi memperkuat akuntabilitas publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Namun demikian, pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas yang merata. Sebagian anggota aktif membangun komunikasi digital, sementara sebagian lainnya masih menjadikan media sosial sebatas sarana pencitraan politik yang minim interaksi substantif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana media sosial benar-benar mampu berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar sebagai alat popularitas politik semata. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran media sosial anggota DPR RI menjadi penting untuk dianalisis secara akademik, terutama dalam kaitannya dengan upaya memperkuat kepercayaan publik di era demokrasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI serta sejauh mana penggunaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga legislatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik digital yang digunakan anggota DPR RI dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori komunikasi politik dan teori kepercayaan publik. Menurut McNair (2011), komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik antara aktor politik, media, dan masyarakat yang bertujuan membentuk pemahaman dan sikap publik. Dalam konteks digital, komunikasi politik mengalami transformasi melalui kehadiran media sosial yang bersifat cepat, terbuka, dan interaktif.

Sementara itu, konsep kepercayaan publik merujuk pada keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan komitmen lembaga negara dalam menjalankan tugasnya (OECD, 2015). Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui komunikasi yang transparan dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai jembatan penting antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membangun trust governance.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara media sosial dan politik. Penelitian oleh Chadwick (2017) menunjukkan bahwa media sosial mampu menciptakan bentuk baru demokrasi hibrida yang menggabungkan politik institusional dan partisipasi warga secara digital. Media sosial memungkinkan politisi untuk membangun komunikasi langsung tanpa perantara media massa konvensional. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan temuan serupa. Studi yang dilakukan oleh Nugroho dan Syarif (2020) menyatakan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun citra politik dan meningkatkan kedekatan emosional antara politisi dan pemilih, terutama generasi muda. Selain itu, penelitian oleh Susanto (2021) menemukan bahwa intensitas komunikasi politik digital berpengaruh terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat.

Namun, beberapa penelitian lain menekankan adanya sisi problematis. Lim (2014) mengungkapkan bahwa media sosial sering kali hanya dimanfaatkan sebagai ruang simbolik tanpa diikuti keterlibatan substantif. Hal ini menyebabkan komunikasi politik digital cenderung bersifat permukaan dan belum sepenuhnya mendorong akuntabilitas politik. Dari kajian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi, efektivitasnya sangat bergantung pada pola komunikasi, kualitas interaksi, serta konsistensi pesan politik yang disampaikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas media sosial dan politik, masih terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek pencitraan politik, kampanye pemilu, atau perilaku pemilih. Kajian yang secara spesifik mengaitkan pemanfaatan media sosial anggota DPR RI dengan peningkatan kepercayaan masyarakat pasca-pemilu masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pada media sosial sebagai alat komunikasi satu arah, tanpa menggali secara mendalam dimensi interaksi, dialog publik, dan akuntabilitas digital. Padahal, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui eksposur informasi, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi politik.

Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis peran media sosial sebagai instrumen demokrasi digital yang tidak hanya membangun citra, tetapi juga memperkuat hubungan representatif antara anggota DPR RI dan masyarakat. Penelitian ini berupaya menempatkan media sosial sebagai ruang publik baru yang berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, partisipasi, dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi politik digital serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, seperti publikasi resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kajian akademik terkait komunikasi politik, serta artikel ilmiah yang membahas penggunaan media sosial oleh pejabat publik. Selain itu, data pendukung diperoleh dari hasil survei nasional mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif serta studi digital literacy di Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga riset independen.

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana media sosial digunakan oleh anggota DPR RI sebagai sarana komunikasi politik, penyampaian informasi publik, dan interaksi dengan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi digital serta hambatan yang muncul, termasuk persepsi publik, transparansi informasi, dan kualitas konten yang disampaikan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan media sosial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Sarana Komunika su Politik Modern

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi politik di Indonesia. Media sosial kini menjadi medium utama yang menghubungkan aktor politik dengan masyarakat secara langsung tanpa perantara media konvensional. Dalam konteks ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menghadapi tuntutan baru untuk beradaptasi dengan model komunikasi politik yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif (McNair, 2011).

Media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, dan YouTube memungkinkan anggota DPR RI menyampaikan pesan politik secara real time kepada publik. Informasi mengenai kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, maupun aktivitas reses dapat dipublikasikan secara langsung, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas dan merata. Kondisi ini sejalan dengan konsep demokrasi digital yang menekankan keterbukaan informasi dan partisipasi warga negara (Castells, 2013).

Selain sebagai sarana penyampaian informasi, media sosial juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan citra politik atau *political branding*. Melalui narasi visual, gaya komunikasi personal, serta interaksi langsung dengan masyarakat, anggota DPR RI dapat membangun kedekatan emosional dengan konstituennya. Kedekatan ini penting karena legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui persepsi publik terhadap integritas dan komitmen wakil rakyat (Chadwick, 2017).

Dalam situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif cenderung fluktuatif, media sosial dapat menjadi sarana strategis untuk mempersempit jarak antara rakyat dan wakilnya. Komunikasi politik yang efektif di ruang digital berpotensi meningkatkan pemahaman publik terhadap fungsi DPR RI sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan demokratis. Dalam konteks lembaga legislatif, keterbukaan informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi anggota DPR RI untuk menampilkan aktivitas politik mereka secara terbuka dan dapat diakses publik kapan saja (OECD, 2015).

Melalui unggahan mengenai pembahasan rancangan undang-undang, rapat kerja komisi, hingga laporan kegiatan reses, masyarakat dapat memantau kinerja wakil rakyat secara lebih objektif. Pola komunikasi ini membantu mengurangi kecurigaan publik serta meminimalkan kesenjangan informasi antara elite politik dan masyarakat. Transparansi yang konsisten dapat membentuk persepsi bahwa DPR RI bekerja secara nyata dan bertanggung jawab (Dwiyanto, 2017).

Akuntabilitas publik juga diperkuat melalui karakter interaktif media sosial. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran secara langsung. Ketika anggota DPR RI merespons aspirasi tersebut dengan sikap terbuka dan solutif, kepercayaan publik akan meningkat karena masyarakat merasa dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi (McQuail, 2010).

Responsivitas terhadap isu-isu aktual, seperti kebijakan publik, konflik sosial, maupun bencana nasional, turut memperkuat citra wakil rakyat yang peduli dan hadir di tengah masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas yang dibangun melalui media sosial menjadi fondasi penting dalam membentuk kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Optimalisasi Media Sosial dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Media sosial membuka peluang baru dalam mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Jika sebelumnya aspirasi publik lebih banyak disalurkan melalui forum reses atau pertemuan tatap muka, kini masyarakat dapat menyampaikan pendapat kapan saja melalui ruang digital. Perubahan ini mendorong terciptanya proses demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif (Castells, 2013).

Bagi anggota DPR RI, media sosial berfungsi sebagai sarana *digital listening* yang memungkinkan pemantauan isu-isu publik secara cepat. Komentar, pesan langsung, maupun diskusi daring dapat menjadi indikator awal terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, anggota DPR dapat memperoleh gambaran kebutuhan publik secara lebih dinamis dan aktual (Chadwick, 2017).

Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, juga meningkat melalui media sosial. Kelompok ini cenderung lebih aktif di ruang digital dibandingkan forum politik konvensional. Ketika aspirasi mereka direspons secara nyata oleh anggota DPR RI, maka akan terbentuk rasa keterlibatan politik yang lebih kuat serta kepercayaan terhadap lembaga legislatif (Nugroho & Syarif, 2020).

Kepercayaan publik semakin menguat apabila aspirasi yang diterima tidak hanya ditampung, tetapi juga ditindaklanjuti dan diinformasikan kembali melalui media sosial. Transparansi dalam proses tindak lanjut ini menciptakan kesan bahwa suara masyarakat benar-benar memiliki dampak dalam pengambilan kebijakan publik.

Tantangan Etika dan Resiko Penyalahgunaan Media Sosial

Meskipun media sosial memiliki potensi besar, penggunaannya dalam komunikasi politik juga menghadirkan berbagai tantangan etika. Salah satu permasalahan utama adalah kecenderungan sebagian politisi menggunakan media sosial semata-mata sebagai alat pencitraan tanpa substansi kebijakan yang jelas. Praktik semacam ini berisiko menurunkan kualitas demokrasi digital (Lim, 2014).

Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulatif, atau bersifat provokatif dapat memperburuk kepercayaan masyarakat. Di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan penyampaian pesan politik dapat dengan mudah memicu polemik publik dan memperkuat sentimen negatif terhadap lembaga legislatif (Wardle & Derakhshan, 2017).

Algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten kontroversial juga berpotensi menciptakan polarisasi politik. Jika tidak dikelola dengan bijak, ruang digital justru dapat memperlebar konflik antara wakil rakyat dan masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama komunikasi politik demokratis, yaitu membangun dialog dan konsensus publik.

Oleh karena itu, penerapan etika komunikasi politik digital menjadi sangat penting. Anggota DPR RI perlu menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, serta literasi digital agar media sosial tetap berfungsi sebagai ruang publik yang sehat dan konstruktif.

Penguatan Strategi Digital untuk Membangun Kepercayaan Jangka Panjang

Untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan, pemanfaatan media sosial harus dilakukan melalui strategi komunikasi yang terencana dan profesional. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Infografis

kebijakan, video penjelasan legislasi, serta diskusi daring merupakan bentuk komunikasi yang efektif (McNair, 2011).

Konsistensi komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas politik. Anggota DPR RI perlu memastikan kesinambungan antara pesan yang disampaikan di media sosial dan tindakan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara narasi digital dan praktik politik justru dapat menurunkan kepercayaan publik (OECD, 2015). Penguatan kapasitas tim pendukung, termasuk staf ahli dan pengelola media sosial, juga sangat diperlukan. Pengelolaan akun secara profesional membantu memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Pendekatan berbasis data dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi politik digital.

Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi instrumen demokrasi yang memperkuat hubungan jangka panjang antara DPR RI dan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi transparansi, partisipasi, dan responsivitas terhadap kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk komunikasi politik modern bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Melalui media sosial, proses penyampaian informasi, penyerapan aspirasi, serta interaksi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di era digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik. Ketika digunakan secara konsisten dan bertanggung jawab, media sosial mampu memperpendek jarak antara DPR RI dan konstituennya serta memperkuat legitimasi demokrasi. Namun demikian, pemanfaatan media sosial juga menghadapi tantangan serius, seperti risiko pencitraan politik semata, penyebaran disinformasi, dan polarisasi publik. Oleh karena itu, etika komunikasi politik dan literasi digital menjadi aspek penting yang harus diperkuat agar media sosial tidak justru merusak kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, kepercayaan publik terhadap DPR RI dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila media sosial dimanfaatkan sebagai ruang transparansi, dialog, dan tanggung jawab publik. Dengan strategi digital yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat, media sosial dapat menjadi jembatan utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

REFERENSI

- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Castells, M. (2013). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Nugroho, Y., Sari, E. A., & Putri, D. A. (2013). *Media Sosial dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Literasi Digital Indonesia*. Jakarta: Kominform.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Indonesia Digital Report*.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Doubleday.
- Coleman, S. & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice, and Policy*. Cambridge University Press.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Lilleker, D. G., Jackson, N., & Veneti, A. (2019). *Political Communication in the Online World*. Routledge.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Jungherr, A. (2015). *Analyzing Political Communication with Digital Trace Data*. Springer.
- Salman, A., & Hasim, M. S. (2011). "New Media and Democracy: The Changing Political Landscape in Malaysia." *Journal of Politics and Law*, 4(2), 103– 110.
- Alamsyah, A. (2020). "Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik Legislator." *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(1), 45–56.
- Prihandini, P. (2021). "Media Sosial sebagai Ruang Aspirasi Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 118–129.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Arifin, A. (2015). *Komunikasi Politik dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deloitte Indonesia. (2022). *Digital Consumer Trends in Indonesia*. Deloitte Southeast Asia.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). (2021). *Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik*. Pusat Penelitian Politik LIPI.